RUMUSAN HASIL
PRA RAPAT KOORDINASI NASIONAL (PRA RAKORNAS)
DAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)
KEMITRAAN PROGRAM BANGGA KENCANA TAHUN 2021

TEMA:

“Meningkatkan Upaya dan Strategi Dalam Rangka Percepatan Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Peran Lintas Sektor Di Masa Pandemi Covid-19”

Jakarta, 27-28 Januari 2021

Pra Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah terlaksana selama 2 hari, pada tanggal 27 – 28 Januari 2021 di BKKBN Pusat melalui Virtual Meeting. Sebagai penguatan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana, yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini adalah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program guna pencapaian Visi BKKBN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong:.

Seluruh peserta telah secara bersama-sama mendengar, membahas dan menyimpulkan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan sinergitas, integrasi dan akselerasi serta komitmen para pemangku kebijakan dalam peningkatan penggerakan Program Bangga Kencana.

Memperhatikan materi paparan para nara sumber pada pertemuan ini, serta hasil diskusi, maka dapat dirumuskan hasil Rakornas Program Bangga Kencana Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) siap mendukung pencapaian Visi Bapak Presiden RI salah satunya adalah Penyederhanaan Birokrasi yang telah dilakukan mulai tahun 2020 yang lalu dengan melakukan Pengalihan Jabatan Administrator (JA) ke Jabatan Fungsional (JF) dengan jumlah total 908 pegawai dari 21 Jabatan Fungsional salah satunya melalui pembentukan jabatan fungsional baru yaitu Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta menata Organisasi kearah lebih efektif yang telah ditetapkan melalui Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN.
2. Selanjutnya, BKKBN akan meng-Evaluasi dan Menata kembali Struktur Organisasi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara serta membangun *Fully Digital System* di lingkungan BKKBN agar tercipta ASN BKKBN yang *SMART* dan terlaksana Tata Keola Pemerintahan yang efektif dan efisien. BKKBN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ASN BKKBN dari Pusat sampai dengan Lini Lapangan, Mempercepat Pengambilan Keputusan untuk membangun Gagasan, Strategi dan Cara-cara Efektif Pelayanan ke Masyarakat/Keluarga/ Individu terkait Program Bangga Kencana, termasuk Penurunan, Percepatan Stunting dan Imunisasi Dasar Lengkap.
3. Berdasarkan Renstra BKKBN 2020-2024, memiliki komitmen untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dengan Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang; menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif; menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi serta

membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

4. Pelaksanaan Program Bangga Kencana di Tahun 2020 menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya Pandemi Covid-19, sehingga dari enam indikator sasaran indikator strategis Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 yang pencapaiannya sempurna, yaitu melebihi 100 persen hanya indikator iBangga, selebihnya tidak mencapai 100 persen, bahkan indikator untuk penurunan persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) hanya tercapai sebesar 64,2% dari target. Upaya BKKBN didalam meningkatkan capaian program Bangga Kencana di Tahun 2021, antara lain melalui:
    a. Penajaman Intervensi Program Bangga Kencana di Masa dan Pasca Pandemi seperti peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan penularan dan penguatn kesiapsiagaan menghadapi pandemic Covid-19
    b. Penyediaan dan peningaktan efektivitas layanan untuk setiap keluarga secara berjenjang dan menyeluruh;
    c. Adaptasi kebiasaan baru di masa dan pasca pandemic dengan merumuskan *unprecendeted policies* berbasis data, menyusun scenario ringan, scenario sedang, dan scenario berat untuk pemulihan pelaksanaan program dan kegiatan di TA. 2021.
5. Adapun kegiatan prioritas BKKBN lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, diantaranya:
    a. Pendataan Keluarga yang akan dimulai pada bulan April s/d 31 Mei 2021
    b. Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
    c. Sosialisasi Program Bangga Kencana bersama Mitra
    d. Program Kampung KB
    e. Penyusunan Blueprint Pembangunan Kependudukan
6. Peningkatan penguatan dukungan manajemen program Bangga Kencana Tahun 2021 diarahkan melalui percepatan Reformasi Birokrasi BKKBN menuju *Result Oriented Government* dengan memastikan:

- Semua tujuan, sasaran, program dan kegiatan mengalir ke semua unit;
- Penetapan target dan kegiatan secara benar;
- Penetapan program dan kegiatan secara rasional dan terukur;
- Penetapan standar biaya berbasis program;
- Penetepan Perjanjian Kinerja secara berjenjang;
- Pengukuran kinerja secara berkala;
- Pengembangan sistem pelaporan kinerja secara akurat;
- Melakukan review manajemen kinerja secara berkala;
- Penetapan system remunerasi;
- Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan monev secara teintegrasi.

7. Peningkatan penguatan dukungan pengawasan internal BKKBN dilakukan dengan mempercepat Transformasi TIK Pengawasan dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti:
   - Automated Proses Bisnis Utama dengan menggunakan aplikasi Audit Manajemen System (AMS), Aplikasi Sistem Informasi Zona Integritas dan Peningkatan Akuntabilitas (Sizuka)
   - *Remote Audit* melalui pelaksanakan pengawasan jarak jauh dengan desk audit, virtual dan data digital, mendorong implementasi manajemen risiko pada seluruh unit kerja;
   - *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT) melalui penggunaan aplikasi/software standar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan serta *software analisis data* (ACL)
   - *On site Audit* dengan mengaktifkan penerapan *Risk Based Audit/Riks Management Based Audit* serta penerapan standar protokol kesehatan secara ketat.
8. Pendataan Keluarga dilaksanakan mulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 sebagai salah satu upaya menghadirkan 1 (satu) data keluarga Indonesia dengan cara sensus terhadap 66.828.571 Kepala Keluarga di Indonesia. Pendataan dilaksanakan dengan menggunakan metode formulir (*paper based*) dan *smartphone.* Hasil Pendataan Keluarga 2021 digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai

dengan tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari *Total Fertility Rat*e (TFR), *Contraseptive Prevalensi Rate* (CPR), *Unmet Need* (proxy), *Age Spesifik Fertility Rate* (ASFR), Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP), serta Informasi Keluarga Beresiko *Stunting*. Kegiatan ini memberdayakan 520.000 kader pendata. Dengan ditunjuknya BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan *Stunting* maka dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga 2021 terdapat penambahan formulir yaitu F/I/PK21-S.

9. Dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 BKKBN berkontribusi pada Penurunan Kematian Ibu dan Stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran. Tiga (3) Indikator Utama Bangga Kencana untuk penilaian usulan DAK Fisik Subbidang KB dari Kabupaten/Kota yaitu : TFR dengan target 2,24, Unmet Need dengan target 8,30%, mCPR dengan target 62,16%. Total Pagu Dana Alokasi Khusus BKKBN Tahun Anggaran 2021 sebesar 2.575 Triliun.
10. Dalam laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala BKKBN (Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, SPOG, (K)) bahwa:
    a. Program Bangga Kencana telah berhasil memperlambat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari 1,49% ditahun 2010 menjadi 1,25% atau pertambahan penduduk sebesar 32,56 juta dalam kurun waktu 10 tahun (sensus penduduk 2020). Kedepan BKKBN tidak hanya berorientasi pada kuantitas penduduk tetapi juga peningkatan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) termasuk program penurunan stunting
    b. BKKBN telah melakukan perubahan yaitu: 1) rebranding dengan menghasilkan 4 (empat) perubahan nilai yaitu: a) logo yang lebih bersahabat dengan keluarga muda dan remaja; b) tagline atau jargon menjadi 2 (dua) anak lebih sehat karena lebih objektif; c) perubahan nama program KKBPK menjadi program Bangga Kencana yang lebih mudah diingat dan direspon oleh Pemerintah daerah dan Desa; d) Kampung KB menjadi kampung keluarga

berkualitas, 2) nilai kinerja penyuluh sampai dengan tingkat user pelayanan BKKBN, 3) peningkatan kualitas pelayanan dengan menambah jenis dan jumlah alat dan obat kontrasepsi.

c. Untuk mempercepat target sasaran BKKBN memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis, oleh karena itu pada tahun 2021 BKKBN akan melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) termasuk keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting.

d. BKKBN siap mengemban amanah baru yang diberikan oleh Presiden RI didukung oleh penyuluh KB/ PLKB dan kader KB di desa, saat ini kondisi jumlah penuyuluh KB semakin menurun dan kondisi Penyuluh KB PNS 13 ribu dan non PNS 9.600 dan BKKBN mengusulkan agar diberikan kemudahan utuk menjadi PNS atau tenaga fungsional atau tenaga P3K.

11. Arahan Presiden RI (Ir. Joko Widodo) yang disampaikan pada acara pembukaan Rakornas di Istana Presiden RI adalah:

    a. Jumlah PKB/PLKB dapat ditambah karena yang dibutuhkan saat ini adalah petugas di lapangan yang dapat langsung menyentuh dan berada ditengah masyarakat. Tugas PKB/PLKB dan Kader yang ada di desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan saja tetapi juga memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, bahagia dan sejahtera.

    b. Saat ini Penduduk Indonesia mayoritas adalah generasi muda, baik yang baru berkeluarga ataupun akan berkeluarga. Tahun 2025, 2030, 2035 akan muncul puncak bonus demografi yang akan didominasi oleh keluarga – keluarga muda sehingga harus disiapkan dengan baik agar keluarga muda tersebut menjadi keluarga yang sehat, produktif dan berkualitas. Untuk itu BKKBN dari pusat sampai ke desa agar:

        1. Menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan. Oleh karena sasaran utama adalah generasi muda dan keluarga muda yang berkarakter digital dan aktif di media sosial maka metode

komunikasi BKKBN juga harus berubah dan berkarakter kekinian. Penyampaian informasi agar menggunakan media – media yang kekinian sehingga pesan bisa sampai ke sasaran.

2. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya mengenai jumlah dan jarak antar kelahiran, tetapi juga sangat penting dilakukan sosialisasi tentang membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang baik bidang Kesehatan, ekonomi, Pendidikan anak dan kebahagiaan keluarga mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses Pendidikan dan kesehatan serta terjaganya sumber-sumber pendapatan sebagai pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
3. Telah diputuskan dalam rapat terbatas bahwa BKKBN akan menjadi ketua pelaksana dalam penanganan penurunan stunting, dimana kondisi 5 tahun lalu yaitu 37% dan pada tahun 2019 sudah turun menjadi 27,6%. Untuk tahun 2024 target yaitu 14%, meskipun angka ini bukan angka yang mudah namun jika dilapangan dikelola dengan manajemen yang baik, bekerjasama dan kolaborasi maka diharapkan target dapat tercapai. Pengelolaan penurunan stunting harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak dan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait untuk bersama-sama menurunkan stunting dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan BKKBN sebagai ketua pelaksana memegang kendali untuk pencegahan stunting.

12. Trend Masalah Kesehatan Ibu dan Anak merupakan permasalahan kesehatan di Indonesia. Target telah ditetapkan salah satunya untuk menurunkan angka Stunting diharapkan turun menjadi **14 persen pada tahun 2024,** Imunisasi Dasar Lengkap naik menjadi 95 persen target 2024. Stunting berkaitan dengan 4 faktor penyebab yaitu 1) Pengetahuan Ibu yang kurang, 2) Infeksi yang berulang pada bayi, 3) Sanitasi yang buruk, 4) Terbatasnya layanan kesehatan. Penurunan program intervensi stunting di bidang kesehatan menghadapi

tantangan selama masa pandemi Covid-19 dan Hampir semua program kesehatan untuk intervensi spesifik penurunan stunting tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup secara signifikan dan diperkirakan situasi ini akan berlangsung hingga 2021 bahkan 2022.

13. Untuk menurunkan angka stunting dilakukan 2 jenis intervensi yaitu Intervensi gizi spesifik sebesar 30% ditujukan pada 1.000 HPK dan kepada Ibu sebelum masa kehamilan (remaja putri) atau intervensi jangka pendek dan Intervensi Gizi sensitif sebesar 70% dilakukan seluruh lintas sektor 23 K/L yang berkolaborasi diluar HPK dan bersifat jangka panjang. Alokasi anggaran K/L telah diberikan kepada berbagai kementerian sebesar 27 Triliyun dengan alokasi yang paling besar pada Kementerian Sosial.
14. Penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi yang dikoordinasikan secara baik dan terarah, bukan lagi dengan melakukan pendekatan program, namun dengan pendekatan keluarga dan secara sosial seperti yang selama ini dilakukan oleh BKKBN.
15. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) siap menerima mandat yang diberikan oleh Bapak Presiden RI sebagai leading percepatan penanganan stunting di Indonesia melalui pendekatan keluarga. Harapannya dengan elaborasi dilakukan di bawah koordinasi BKKBN, kerjasama dilakukan dengan lebih terarah, secara komprehensif dan bersama-sama maka cakupan program tercapai dan masuk ke program yang lebih spesifik dan akselerasi penurunan stunting dapat dilakukan dengan baik.
16. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana mendukung Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021, untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan *major project* percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting* serta penguatan sistem kesehatan.

17. Strategi perencanaan dan pendanaan pembangunan untuk mendukung implementasi Program Bangga Kencana Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui:
    - Peningkatan kualitas pengelolaan belanja pemerintah pusat, dengan memperhatikan pemulihan kondisi pasca pandemi covid-19, dilakukan secara efisien dan merealokasi anggaran kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi tinggi.
    - Optimalisasi efektivitas dan pemanfaatan Dana Transfer Khusus (DTK), dengan sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan sinergitas DTK (DAK fisik dan non fisik) dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lain untuk mendukung program bersifat multibidang seperti penanganan kematian ibu dan *stunting*; menjaga komitmen daerah mendukung program Bangga Kencana sesuai kewenangannya melalui dukungan APBD.
    - Pemanfaatan sumber pendanaan non pemerintah, dengan mengkaji potensi yang memungkinkan sesuai regulasi yang ada.
    - Optimalisasi dana desa untuk mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana, dengan sinergitas dan pemanfaatan yang responsif terhadap bencana dan situasi khusus seperti konvergensi pencegahan stunting di desa terutama 1000 HPK, pelayanan KB KR dalam situasi kebencanaan, pengasuhan anak dan pencegahan perkawinan anak.
18. Perlu segera dilakukan pemetaan menu kegiatan DAK Subbidang KB Tahun 2021 terhadap Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai acuan nomenklatur kegiatan DAK Fisik Subbidang KB dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
19. Pemerintah daerah perlu berperan serta dalam Penurunan stunting di daerah masing-masing. Pada tahun 2021 Menu DAK terdapat dukungan dalam penurunan Stunting, yaitu Pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) kit stunting untuk Kab/ Kota Lokus Stunting.

20. Pemerintah Daerah dapat mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga melalui sosialisasi terkait pelaksanaan pendataan keluarga, pengerahan tenaga pendukung untuk mendukung pelaksanaan pendataan keluarga diantaranya perangkat kecamatan, perangkat desa, warga, dll, menerbitkan regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan pendataan keluarga, mengalokasikan pendanaan terkait dengan pendataan keluarga, dalam rangka penyelenggaraan pendataan dan pemutakhiran data keluarga sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019.
21. Hasil pendataan keluarga dapat digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan program BANGGA KENCANA, pencegahan *stunting* dan program pembangunan lainnya. Selain menyediakan basis data keluarga Indonesia, Pendataan Keluarga Tahun 2021 memuat informasi keluarga berisiko *stunting*. Untuk memperoleh data tersebut khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), maka pelaksanaannya di lapangan perlu diintegrasikan dengan Bulan Bakti Penimbangan Balita dan Pemberian Vitamin A di POSYANDU.